



PROSIDING SEMINAR NASIONAL POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN BOGOR

Journal homepage: <https://jurnal.polbangtan-bogor.ac.id/>

Evaluasi Kebijakan Permentan 03 Tahun 2022 dalam Penerapan Teknologi Pertanian pada Kawasan Sentra Kelapa Sawit untuk Pengembangan Perkebunan Berkelanjutan

Evaluation of the Ministry of Agriculture Regulation No. 03 of 2022 on the Application of Agricultural Technology in Palm Oil Center Areas for Sustainable Plantation Development

Pretty Luci Lumbanraja^{1*}, Penny Chariti Lumbanraja²

¹PT Riset Perkebunan Nusantara, Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia, 16128

²Dinas Koperasi, Perdagangan, dan Perindustrian, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, Indonesia, 21222

*Email correspondence: prettylucilr@gmail.com

Informasi Artikel

Diterima: 25 Juni 2025

Diterbitkan online: 1 September 2025

Keywords

Kebijakan Pemerintah,
Kelapa Sawit, Pangan,
Pekebun Rakyat, Teknologi.

Abstract

Indonesia as the world's largest palm oil producer continues to encourage the development of sustainable palm oil through various national policies, one of which is the Regulation of the Minister of Agriculture Number 03 of 2022. This study aims to evaluate the implementation of this policy in ten main palm oil center provinces in Indonesia, especially regarding access to technology, extension, facilities and infrastructure, and farmer empowerment. Using a qualitative approach and secondary data analysis, this study applies William Dunn's policy evaluation framework which includes effectiveness, efficiency, equity, responsiveness, adequacy, and accuracy. The results of the study show that there is still inequality in the distribution of seeds, fertilizers, and agricultural machinery, one example of which is that Riau Province as the largest region actually receives the least assistance. Uneven coverage of extension also has an impact on the low adoption of good agricultural practices. The dominance of independent farmers and smallholders who have minimal access to superior seeds, financing, and market institutions also hinders productivity and sustainability. This study recommends the need for productivity cluster-based targeting, fairer input distribution, strengthening farmer institutions, and the preparation of a national agroforestry roadmap to support multifunctional landscapes and food self-sufficiency. These results are expected to be input for improving more inclusive and sustainable smallholder palm oil policies.



1. Pendahuluan

Kelapa sawit memiliki tingkat produktivitas yang tinggi dibandingkan dengan tanaman minyak nabati lainnya. Dalam satu hektar lahan yang sama, kelapa sawit menghasilkan minyak nabati dalam volume yang lebih besar dibandingkan kedelai, rapeseed, dan bunga matahari. Sebagai negara produsen minyak sawit terbesar, Indonesia memiliki program dan kebijakan untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit, termasuk program Peremajaan Sawit Rakyat, Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat, dan Pengembangan SDM Petani Sawit (Sipayung, 2023).

Produktivitas kelapa sawit yang tinggi di kawasan sentra terbukti secara nyata mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, terlihat dari lonjakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di daerah-daerah tersebut. Daerah sentra sawit mencatat pertumbuhan ekonomi lebih cepat dibandingkan wilayah lain, bahkan mampu mengubah wilayah pelosok menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru (Ddin, 2025).

Produktivitas aktual kebun sawit di Indonesia masih jauh di bawah potensi maksimalnya. Misalnya, rata-rata produktivitas nasional sekitar 4 ton minyak/ha/tahun, padahal potensi varietas unggul bisa mencapai hingga 18,5 ton minyak/ha/tahun (Rosmegawati, 2021). Artinya, masih ada peluang besar untuk meningkatkan hasil panen tanpa perlu membuka lahan baru. Hal ini terlihat pada Tabel 1 dimana kecenderungan produktivitas kelapa sawit di Indonesia pada kawasan sentra sawit belum mencapai 4 ton minyak/ha/tahun.

Pengembangan produksi pangan dan energi sebagai upaya untuk mencapai swasembada tidaklah mudah, namun sawit dapat menjadi alternatif terbaik. Melalui integrasi tanaman pangan seperti padi gogo di lahan sawit yang sedang diremajakan, program ini berpotensi meningkatkan produksi pangan nasional. Selain itu, pemanfaatan minyak sawit untuk biodiesel mendukung ketahanan energi nasional (Lubis, 2025). Kementerian Pertanian juga menanam padi gogo di lahan kelapa sawit sebagai langkah strategis untuk meningkatkan produksi pangan dan mendukung swasembada pangan nasional (Ditjenbun, 2025).

Tabel 1. Luas Areal dan Produksi pada 10 Kawasan Sentra Sawit Terbesar di Indonesia

No	Provinsi	Luas Arel (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (kg/ha)
1	Riau	2.296.480	5.441.042	3.583
2	Kalimantan Barat	666.744	1.172.783	3.038
3	Jambi	648.283	1.317.654	3.197
4	Sumatera Selatan	557.184	1.801.300	3.777
5	Sumatera Utara	501.114	1.813.216	4.394
6	Kalimantan Tengah	400.938	1.052.198	4.541
7	Bengkulu	328.251	1.000.962	3.608
8	Aceh	263.494	475.818	3.054
9	Sumatera Barat	254.951	722.851	3.764
10	Kalimantan Timur	220.345	305.000	3.054

Sumber: Ditjenbun, 2024

Berdasarkan Tabel 1 di atas, Kalimantan Barat memiliki luas lebih besar dari Jambi, namun produksinya justru lebih rendah (1.172.783 ton dengan 1.317.654 ton). Sedangkan provinsi Sumatera Utara dengan areal hanya 501 ribu ha, mampu menghasilkan 1,81 juta ton dimana angka ini lebih tinggi dari provinsi dengan lahan lebih luas seperti Kalbar atau Jambi. Sedangkan Kalimantan barat dan Kalimantan tengah memiliki kendala geografis dan infrastruktur (Junita, et al, 2027). Hal ini menunjukkan bahwa luasan lahan bukan satu-satunya penentu produktivitas. Beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi adalah: 1) akses teknologi dan infrastruktur, dimana provinsi seperti Jambi, Sumsel, dan Sumut memiliki lebih banyak akses ke pabrik kelapa sawit (PKS), teknologi budidaya, dan jalan kebun yang memadai; 2) kualitas manajemen kebun, dimana keberadaan koperasi, kemitraan dengan perusahaan, dan dukungan pemerintah yang kuat bisa berdampak besar pada output produksi (Lumbanraja, et al, 2023).

Dalam Wibowo, (2023) menyatakan ekspansi perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat sudah marak semenjak awal tahun 1980-an. Ekspansi tersebut didorong oleh meluasnya permintaan pasar global terhadap suplai minyak nabati sawit yang juga mendorong lajunya ekspansi perkebunan sawit di sejumlah wilayah di Asia Tenggara. Hal tersebut menstimulasi perdagangan kelapa sawit, investasi lebih lanjut, dan meluasnya akuisisi lahan.

Tabel 2. Penerapan Teknologi pada Sub Perkebunan Kelapa Sawit

No	Provinsi	Potensi Ketersediaan Benih Kelapa Sawit (Kecambah)	Alokasi Pupuk NPK Bersubsidi (Ton)	Akses terhadap Kredit Usaha Rakyat (Rumah Tangga)	Bantuan Alsintan – Traktor Roda 4 (Unit)
1	Riau	82.631.401	5.995	100.837	2
2	Kalimantan Barat	-	42.058	90.366	22
3	Jambi	-	23.420	60.035	5
4	Sumatera Selatan	30.000.000	170.454	170.201	38
5	Sumatera Utara	116.767.893	144.779	193.835	64
6	Kalimantan Tengah	3.500.000	52.744	50.058	8
7	Bengkulu	-	36.436	55.249	-
8	Aceh	-	97.477	72.916	118
9	Sumatera Barat	-	76.289	152.722	13
10	Kalimantan Timur	-	12.367	35.468	11

Sumber: Sarana Pertanian, 2024; Sensus Pertanian 2023 Tahap II

Berdasarkan pada Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa pada distribusi benih sawit, di Provinsi Sumatera Utara (116 juta kecambah) dan Riau (82 juta) menjadi penerima terbesar benih unggul. Sementara untuk Provinsi Kalimantan sebagian besar tidak mendapat alokasi benih yang tercatat, bisa jadi belum mendapatkan prioritas replanting atau tidak tercatat pada tahun ini. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah mendorong peremajaan (*replanting*) sawit lebih agresif di Sumatera, terutama Sumut dan Riau, sebagai basis produksi nasional.

Pada aktivitas alokasi pupuk NPK bersubsidi, untuk provinsi Sumatera Selatan (170.454 ton), Sumatera Utara (144.779 ton), dan Sumatera Barat (152.722 ton). Sementara

Provinsi Riau hanya mendapatkan 5.995 ton, padahal luas lahannya terbesar. Hal ini mengindikasikan distribusi pupuk belum proporsional. Serta terdapat prioritas alokasi pupuk di provinsi dengan program intensifikasi sawit rakyat (Redaksi Sawit Indonesia, 2024).

Pada aktivitas pemberian bantuan alsintan menunjukkan bahwa penerimaan terbanyak terdapat pada Provinsi Aceh (118 unit), Sumatera Utara (64 unit), dan Sumatera Selatan (38 unit). Sementara Riau hanya mendapat 2 unit yang bertentangan dengan luas lahannya yang terbesar. Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan bantuan alsintan masih belum optimal dikarenakan perbedaan profil wilayah, kesiapan kelembagaan petani, atau efektivitas pengajuan program (Anugrah, et al, 2022).

Berdasarkan penelitian Kariyasa, (2015) menyatakan bahwa pada Kalimantan Barat, penggunaan bibit bersertifikat masih terbatas, yang berdampak pada rendahnya produktivitas petani sawit rakyat. Tarigan, (2020) menyatakan Sumatera Utara memiliki infrastruktur dan kapasitas produksi benih yang lebih baik dibandingkan dengan Kalimantan, yang dapat menjelaskan distribusi benih yang lebih merata di Sumatera Utara. Hidayati, et al (2016) bahwa menekankan pentingnya distribusi benih berkualitas dalam upaya revitalisasi perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara, yang menunjukkan perhatian pemerintah terhadap distribusi benih di wilayah ini. Saraswati dan Surahman, (2016) menyatakan pentingnya distribusi benih berkualitas dalam pengembangan kelapa sawit di Indonesia, yang relevan dengan perbedaan distribusi benih antara Sumatera Utara dan Kalimantan.

Sehingga, didukung dengan penelitian-penelitian sebelumnya perlu dilakukan evaluasi terhadap penerapan berdasarkan Peraturan Menteri 03 tahun 2022 dalam upaya pengembangan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Evaluasi adalah suatu penelitian yang bersifat menyeluruh, dilaksanakan pada waktu tertentu terhadap suatu program atau hasil yang dicapai oleh suatu organisasi. Evaluasi menjadi bagian yang melekat dan berkelanjutan dalam proses program pemerintah. Evaluasi dilaksanakan dengan maksud untuk mengetahui kesesuaian efektivitas kegiatan antara perencanaan dan pelaksanaan serta keberhasilan program. Penelitian ini menggunakan teori William Dunn yang mengatakan bahwa evaluasi suatu program dapat efektif bilamana memenuhi kriteria-kriteria evaluasi. Kriteria evaluasi menurut terdiri atas efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan (Amir, 2023).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada 10 (sepuluh) kawasan sentra sawit terbesar di Indonesia dengan periode tahun 2023. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dan jenis penelitian yang diterapkan adalah fenomenologi, yang bertujuan untuk memberikan deskripsi sistematis, faktual, dan aktual terhadap objek yang diteliti. Sumber data penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), buku, jurnal, dan literatur lain yang terkait.

3. Hasil dan Pembahasan

a) Evaluasi Data

Berdasarkan Peraturan Menteri 03 tahun 2022 menyatakan ruang lingkup meliputi: a) pengembangan sumber daya manusia; b) penelitian dan pengembangan; c) peremajaan; dan d) sarana dan prasarana. Pengembangan sumber daya manusia melalui: a) pendidikan;

b) pelatihan; c) penyuluhan; dan d) pendampingan fasilitas. Kemudian, dari penelitian dan pengembangan dilakukan untuk penciptaan inovasi dan peningkatan pengetahuan dan teknologi pemuliaan, budidaya, panen, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil serta penguatan lembaga penelitian dan pengembangan.

Peremajaan diberikan kepada pekebun dengan syarat tergabung dalam kelembagaan pekebun (Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Pekebun lainnya) dan memiliki legalitas lahan. Sementara sarana dan prasarana diberikan untuk meningkatkan produksi, produktivitas, nilai tambah dan mutu hasil perkebunan kelapa sawit, berupa: benih, pupuk, pestisida, alat pascapanen dan unit pengolahan hasil, akses jalan, transportasi, mesin pertanian, infrastruktur pasar, dan verifikasi teknis.

Tabel 3. Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Provinsi	Penyuluhan Perkebunan
1	Riau	2.065
2	Kalimantan Barat	8.000
3	Jambi	4.863
4	Sumatera Selatan	20.910
5	Sumatera Utara	13.834
6	Kalimantan Tengah	4.471
7	Bengkulu	1.658
8	Aceh	5.280
9	Sumatera Barat	10.715
10	Kalimantan Timur	9.807

Sumber: Sensus Pertanian 2023 Tahap II

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan bahwa provinsi seperti Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat memiliki jumlah kegiatan penyuluhan yang tinggi. Sementara itu, Riau dan Bengkulu (padahal termasuk sentra sawit) justru memiliki angka penyuluhan yang jauh lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya penyuluhan dapat berkontribusi pada peningkatan kapasitas petani sawit rakyat, khususnya dalam penerapan praktik *Good Agricultural Practices* (GAP) dan teknologi tepat guna. Provinsi yang memiliki tingkat produksi rendah dibanding luas areal seperti Kalimantan Barat, kemungkinan mengalami kendala dari segi transfer pengetahuan, yang bisa dibantu oleh peningkatan penyuluhan (Muflihani, et al, 2024).

Beberapa peran strategis penyuluhan dalam sawit berkelanjutan, yakni: 1) mendorong rejuvenasi dimana penyuluh berperan penting dalam memperkenalkan program peremajaan sawit rakyat (PSR) dan memastikan petani memilih benih unggul bersertifikat; 2) pengenalan teknologi yaitu memberikan pemahaman tentang teknologi pertanian digital, irigasi tetes, pemupukan berimbang, dan penggunaan alsintan; 3) praktik berkelanjutan dengan mengedukasi petani tentang konservasi tanah dan air, pengurangan emisi, dan praktik pertanian ramah lingkungan; 4) akses pasar dan sertifikasi melalui penyuluh dapat membantu petani memahami standar ISPO/RSPO untuk mempermudah akses pasar global (Ernah, et al, 2021).

Tabel 4. Evaluasi Peremajaan melalui Status Pekebun

No	Provinsi	Petani Plasma	Petani Swadaya
1	Riau	27.412	678.618
2	Kalimantan Barat	35.375	665.473
3	Jambi	10.571	525.186
4	Sumatera Selatan	23.067	1.138.176
5	Sumatera Utara	10.738	1.478.026
6	Kalimantan Tengah	14.773	284.145
7	Bengkulu	2.220	316.909
8	Aceh	6.568	781.372
9	Sumatera Barat	7.214	717.178
10	Kalimantan Timur	11.825	194.094

Sumber: Sensus Pertanian 2023 Tahap II

Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan bahwa hampir di seluruh provinsi, jumlah petani swadaya jauh lebih besar daripada petani plasma. Provinsi dengan selisih mencolok yakni Sumatera Utara, hanya 10.738 petani plasma dengan 1.478.026 petani swadaya; Sumatera Selatan dengan 23.067 petani plasma dan 1.138.176 petani swadaya; serta Aceh: 6.568 petani plasma dengan 781.372 petani swadaya.

Menurut Sunkar, et al, (2024) perbedaannya adalah petani plasma memiliki akses lebih baik terhadap benih unggul dan pupuk bersubsidi, penyuluhan, pelatihan, serta teknologi dari perusahaan inti, serta akses pasar dan harga jual yang lebih stabil. Sebaliknya, petani swadaya sering menghadapi kendala seperti menggunakan benih tidak bersertifikat, terbatas dalam akses informasi, teknologi, dan permodalan serta minim pendampingan teknis dan kelembagaan (Lumbanraja dan Lumbanraja, 2024). Hal ini menimbulkan kesenjangan produktivitas antara kelompok plasma dan swadaya. Petani swadaya cenderung memiliki hasil produksi per hektar lebih rendah dan mutu TBS (Tandan Buah Segar) yang lebih rendah pula.

Tabel 5. Evaluasi Kepemilikan Lahan

No	Provinsi	Pekebun Gurem
1	Riau	72.747
2	Kalimantan Barat	58.620
3	Jambi	42.594
4	Sumatera Selatan	49.427
5	Sumatera Utara	278.159
6	Kalimantan Tengah	19.959
7	Bengkulu	19.572
8	Aceh	116.247
9	Sumatera Barat	151.311
10	Kalimantan Timur	9.908

Sumber: Sensus Pertanian 2023 Tahap II

Dari Tabel 5 menunjukkan bahwa provinsi seperti Sumatera Utara (278.159), Sumatera Barat (151.311), dan Aceh (116.247) memiliki jumlah pekebun gurem yang sangat tinggi dibanding provinsi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa struktur kepemilikan lahan di

sektor sawit rakyat sangat terfragmentasi dan mayoritas hanya menguasai lahan sangat kecil (biasanya di bawah 0,5 hektar).

Menurut Nadhif, (2024) pekebun gurem umumnya mengalami berbagai keterbatasan, yaitu skala ekonomi rendah, sehingga tidak efisien dalam produksi, sulit mendapatkan akses pembiayaan dan subsidi, minim akses terhadap teknologi, benih unggul, dan pelatihan teknis, serta rentan terhadap fluktuasi harga TBS dan biaya produksi tinggi. Hal ini mengakibatkan produktivitas per hektar rendah, mutu produk tidak terstandar, dan sulit memenuhi standar pasar nasional maupun ekspor.

Keberadaan pekebun gurem dalam jumlah besar menjadi tantangan besar dalam modernisasi pertanian sawit berbasis teknologi, peremajaan sawit rakyat (PSR) yang butuh modal dan manajemen kolektif, penelusuran asal (traceability) dalam rantai pasok global sawit yang kini mensyaratkan transparansi dan legalitas lahan, pekebun gurem cenderung tidak memiliki sertifikasi, legalitas, dan akses ke pasar formal, sehingga terpinggirkan dari rantai pasok industri.

Berdasarkan Tabel 2, dilakukan evaluasi terhadap penerapan teknologi perbenihan, pemupukan, hingga pengolahan lahan yang mempengaruhi pengembangan kelapa sawit berkelanjutan. Pada ketersediaan benih kelapa sawit, faktor-faktor yang mempengaruhi adalah:

Tabel 6. Evaluasi Teknologi Pengolahan Lahan untuk Kegiatan Agroforestry

No	Provinsi	Satuan (Rumah Tangga)
1	Riau	1.674
2	Kalimantan Barat	5.692
3	Jambi	4.692
4	Sumatera Selatan	20.002
5	Sumatera Utara	6.062
6	Kalimantan Tengah	2.598
7	Bengkulu	5.458
8	Aceh	3.812
9	Sumatera Barat	9.542
10	Kalimantan Timur	3.645

Sumber: Sensus Pertanian 2023 Tahap II

Berdasarkan Tabel 6 menunjukkan bahwa mayoritas provinsi menunjukkan angka rumah tangga yang relatif rendah sebagai adopter teknologi agroforestry, kecuali Sumatera Selatan (20.002) dan Sumatera Barat (9.542) yang terlihat cukup tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa model pertanian terpadu (campuran sawit dengan tanaman lain atau pohon kehutanan) belum menjadi praktik umum di sebagian besar wilayah sentra sawit.

Penelitian Kurnianingsih, et al, (2025) agroforestry adalah sistem yang mengintegrasikan tanaman kehutanan dan pertanian, dan berpotensi memperkuat keberlanjutan dalam sektor sawit rakyat, seperti: 1) diversifikasi pendapatan melalui kombinasi sawit dengan tanaman pangan, buah, atau kehutanan (misal: karet, kakao, atau durian) menambah sumber pendapatan petani, mengurangi ketergantungan pada harga TBS, 2) konservasi tanah dan air melalui tanaman pelindung dalam agroforestry mencegah erosi, mempertahankan kelembaban tanah, dan menjaga keseimbangan ekosistem, 3) peningkatan ketahanan pangan lokal, jika sawit ditanam bersama tanaman pangan lokal,

akan memperkuat swasembada pangan rumah tangga petani; 4) dukungan pada rehabilitasi lahan dimana sistem ini cocok diterapkan pada lahan marginal atau yang rusak, sehingga mendukung restorasi lingkungan.

b) Evaluasi Kebijakan

Berdasarkan hasil evaluasi kebijakan Permentan No. 03 Tahun 2022 jika dikaitkan dengan teori evaluasi kebijakan menurut William Dunn, yang mencakup enam kriteria, yaitu: pertama, dari segi efektivitas (effectiveness), distribusi bantuan teknologi seperti benih, pupuk, dan alsintan belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan produktivitas petani sawit rakyat, terutama petani swadaya dan gurem. Hal ini menunjukkan Tujuan kebijakan belum sepenuhnya tercapai, sehingga efektivitasnya masih terbatas. Kedua, dari segi efisiensi (efficiency), dimana bantuan yang diberikan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah. Contoh: Riau memiliki areal luas namun hanya menerima sedikit bantuan traktor. Alokasi sumber daya belum proporsional dan efisien terhadap kebutuhan daerah.

Ketiga, dari segi kecukupan (adequacy), dimana petani gurem masih minim akses terhadap teknologi, pelatihan, dan kelembagaan. Sehingga upaya yang dilakukan pemerintah belum cukup untuk menjawab tantangan besar di lapangan, seperti produktivitas rendah dan rendahnya daya saing (Lumbanraja dan Lumbanraja, 2024). Keempat, dari segi pemerataan (equity), distribusi input produksi dan layanan penyuluhan belum merata antar provinsi sentra sawit. Sumatera cenderung lebih banyak menerima dukungan dibanding Kalimantan. Sehingga pemerataan kebijakan masih lemah; terjadi ketimpangan antarwilayah.

Kelima, dari segi responsivitas (responsiveness), menunjukkan kebutuhan petani swadaya terhadap penyuluhan, pendampingan, dan skema pembiayaan mikro belum terjawab secara memadai. Sehingga kebijakan belum cukup responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan di sektor sawit rakyat. Terakhir, dari segi ketepatan (appropriateness/accuracy), masih banyak program tidak disesuaikan dengan kondisi lokal, seperti model teknologi dan sistem usaha tani. Sehingga penempatan program masih bersifat umum, belum tepat sasaran berbasis klaster produktivitas atau kelembagaan.

c) Implikasi

1. Distribusi Benih yang Belum Merata

Sumatera Utara memperoleh potensi benih mencapai 116 juta kecambah, sedangkan Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan sebagian besar provinsi lain tidak memiliki distribusi yang tercatat. Menurut Permentan 03/2022 mengatur pentingnya akses sarana produksi termasuk benih unggul, tetapi implementasi masih timpang antar provinsi. Sehingga pemerintah perlu mendorong pemerataan distribusi benih unggul melalui penguatan sistem logistik dan produsen benih lokal (Saraswati dan Surahman, (2016).

2. Kesenjangan Akses Teknologi dan Sarana Produksi

Sumatera Selatan dan Aceh menerima bantuan alat mesin pertanian (Alsintan) dalam jumlah besar (38 dan 118 unit), sementara Riau hanya 2 unit meskipun luasan arealnya terbesar. Akses terhadap subsidi pupuk NPK dan kredit usaha juga sangat bervariasi.

Realisasi bantuan belum berbasis pada kebutuhan spesifik daerah atau potensi produktivitas aktual. Sehingga perlu dilakukan *focus targeting* berdasarkan produktivitas, jumlah petani swadaya, dan luas tanam (Sulaiman, et al, 2018).

3. Rendahnya Intensitas Penyuluhan di Wilayah Strategis

Riau dan Bengkulu termasuk provinsi dengan angka penyuluhan terendah, padahal mereka adalah sentra produksi sawit. Menurut Permentan 03/2022 mendorong peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan penyuluhan, tapi kenyataan menunjukkan pendekatan tersebut belum optimal di wilayah prioritas. Sehingga perlu dilakukan pemetaan ulang kebutuhan penyuluhan dan penempatan tenaga penyuluh berbasis klaster produktivitas sawit rakyat (Wahyudi, 2024).

4. Dominasi Petani Swadaya dan Pekebun Gurem

Proporsi petani swadaya sangat besar (contoh: Sumut 1,4 juta, Riau 678 ribu), demikian pula jumlah pekebun gurem (Sumut: 278 ribu, Sumbar: 151 ribu). Permentan 03/2022 menekankan pemberdayaan petani, namun kenyataannya petani swadaya dan gurem masih banyak yang tidak terfasilitasi teknologi maupun kelembagaan. Sehingga harus ada afirmasi khusus untuk petani gurem dan swadaya dalam bentuk pembentukan koperasi, penguatan akses pasar, dan kredit mikro (Hermawan dan Andrianyta, 2016).

5. Agroforestry dan Diversifikasi Masih Lemah

Penerapan agroforestry baru terlihat di beberapa provinsi (Sumatera Selatan: 20 ribu rumah tangga), belum menyeluruh. Agroforestry penting dalam konteks keberlanjutan sawit, tetapi belum menjadi pendekatan utama di lapangan meskipun disebut dalam kebijakan. Sehingga perlu dilakukan *roadmap* nasional agroforestry sawit untuk mendukung *multifunctional landscapes* dan swasembada pangan (Redaksi InfoSAWIT, 2025).

4. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap distribusi benih yang belum merata, sehingga pemerintah perlu mendorong pemerataan distribusi benih unggul melalui penguatan sistem logistik dan produsen benih lokal
2. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap masih adanya kesenjangan akses teknologi dan sarana produksi, sehingga pemerintah perlu melakukan *focus targeting* berdasarkan produktivitas, jumlah petani swadaya, dan luas tanam
3. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap dominasi petani swadaya dan pekebun gurem sehingga perlu dilakukan afirmasi khusus untuk petani gurem dan swadaya dalam bentuk pembentukan koperasi, penguatan akses pasar, dan kredit mikro
4. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap agroforestry dan diversifikasi yang masih lemah, perlu dilakukan *roadmap* nasional agroforestry sawit untuk mendukung *multifunctional landscapes* dan swasembada pangan

Daftar Pustaka

- Amir, F. (2023). Evaluasi Kebijakan Program *Rural Empowerment And Agricultural Development Scalling Up Innitiative* (READ-SI) di Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Seminar Nasional Hasil Penelitian 2023: *Penguatan Riset, Inovasi, Kreativitas Peneliti di Era 5.0*. Pp: 1235-1249.
- Anugrah, I. S., Syahyuti, dan J. Hestina. (2022). Tata Kelola Bantuan Alat dan Mesin Pertanian Sebagai Instrumen Pendukung Pertanian Modern. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. Vol. 40 (2). Pp: 105-118.
- Ddin, A. (2025). Bikin PDRB Daerah Sentra Meroket, Bukti Nyata Kontribusi Ekonomi. Diakses dari <https://haisawit.co.id/news/detail/sawit-bikin-pdrb-daerah-sentra-meroket-bukti-nyata-kontribusi-ekonomi> [30 Juni 2025].
- Ditjenbun. (2025). Langkah Strategis Wujudkan Swasembada Pangan, Kementan Tanam Perdana Padi Gogo di lahan Kelapa Sawit Sumsel. Diakses dari <https://ditjenbun.pertanian.go.id/langkah-strategis-wujudkan-swasembada-pangan-kementan-tanam-perdana-padi-gogo-di-lahan-kelapa-sawit-sumsel/> [02 Juni 2025].
- Ernah, E. Wulandari, Sudarjat. (2021). Pengenalan Standar Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan. *Jurnal Abdidas*. Vol. 2 (1). Pp: 1-160.
- Hermawan, H., dan H. Andrianyta. (2016). Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis: Terobosan Penguatan Kelembagaan dan Pembiayaan Pertanian di Perdesaan. *Analisis Kebijakan Pertanian*. Vol. 10 (2). Pp: 142
- Hidayati, J., Sukardi, A. Suryani, A. M. Fauzi. (2016). Identifikasi Revitalisasi Perkebunan Kelapa Sawit di Sumatera Utara. *Identification of Factors Increasing Productivity for Revitalization of Palm Oil Plantation in North Sumatera. Jurnal Teknologi Industri Pertanian*. Vol. 26 (3). Pp: 255-265.
- Junita, N., F. Juniardi, H. Azwansyah. (2017). Analisis Aksesibilitas Infrastruktur Pedesaan di Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat. *JeLAST : Jurnal Teknik Kelautan , PWK , Sipil, dan Tambang*. Vol. 4 (4).
- Kariyasa, I. K. (2015). Analisis Kelayakan Finansial Penggunaan Bibit Bersertifikat Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Agro Ekonomi*. Vol. 33 (2): 141.
- Kurnianingsih, A., S. Yahya, S. Sudradjat. (2025). Kelapa Sawit sebagai Tanaman Agroforestri. *Warta Pusat Penelitian Kelapa Sawit*. Vol. 30 (1).
- Lubis, E. S. (2025). Review: Program Sawit Rakyat (PSR) sebagai Akselerasi Swasembada Pangan dan Energi. *Paspalum: Jurnal Ilmiah Pertanian*. Vol. 13 (1). Pp: 210-226.
- Lumbanraja, P. L., P. C. Lumbanraja, A. W. Muttaqin, dan S. I. Samal. (2023). The Influence of Farmers' Welfare on Oil Palm Plantation Productivity in Indonesia. *Indonesian Journal of Agricultural Research*. Vol 6 (2). Pp: 92-105.
- Lumbanraja, P. L. dan P. C. Lumbanraja. (2024). Faktor-faktor Produktivitas Kelapa Sawit Rakyat di Provinsi Sumatera Utara melalui Pendekatan Metode *Vector Error Correction*

- Model (VECM). Journal of Analytical Research, Statistics and Computation*, Vol. 3 (2). Pp: 82-98.
- Lumbanraja, P. L. dan P. C. Lumbanraja. (2024). Analysis of the Effect of Palm Oil Productivity on Indonesian Palm Oil (CPO) Supply Chain Management 2015-2021 Through Government Policy as a Mediation Variable. *Indonesian Journal of Agricultural Research*. Vol 7 (3). Pp: 203-215.
- Muflihani, A. R., G. Mulyasari, M. Z. Yuliarso, E. Sulistyowati. (2024). Analisis Sistem Agribisnis Pada Tanaman Kelapa Sawit Rakyat. *Jurnal Arview*. Vol. 3 (2). Pp: 82-95.
- Nadhif. (2024). Memberdayakan Petani Gurem di Riau. Diakses dari <https://www.cakaplah.com/berita/baca/113781/2024/08/19/memberdayakan-petani-gurem-di-riau#sthash.mVOQvEYe.dpbs> [02 Juni 2025].
- Permentan. 2022. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.
- Redaksi Sawit Indonesia. (2024). Pemerintah Alokasikan 45,8 T untuk Pupuk Bersubsidi di Tahun 2025. Diakses dari <https://sawitindonesia.com/pemerintah-alokasikan-458-t-untuk-pupuk-bersubsidi-di-tahun-2025/> [02 Juni 2025].
- Redaksi InfoSAWIT. (2025). Agroforestri Sawit, Solusi Ramah Lingkungan. Diakses dari <https://www.infosawit.com/2025/04/20/agroforestri-sawit-solusi-ramah-lingkungan/> [30 Mei 2025].
- Rosmegawati. (2025). Peran Aspek Teknologi Pertanian Kelapa Sawit untuk Meningkatkan Produktivitas Produksi Kelapa Sawit. *Jurnal Agrisia*. Vol. 13 (2). Pp: 73-90.
- Saraswati, P. U., dan M. Surahman. (2016). Produksi dan Pemasaran Bahan Tanaman Kelapa Sawit (*Elaeis guineensis* Jacq.) di Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Marihat Sumatera Utara. Makalah Seminar Departemen Agronomi dan Hortikultura. Diakses dari <https://repository.ipb.ac.id/> [29 Mei 2025].
- Sipayung, T. (2023). Jurnal Kelapa Sawit dan Produktivitas. Diakses dari <https://palmoilina.asia/jurnal-kelapa-sawit/sawit-dan-produktivitas/> [29 Mei 2025].
- Sulaiman, A. A., S. Herodian, A. Hendriadi, E. Jamal, A. Prabowo, A. Prabowo, L. T. Mulyantara, U. Budiharti, Syahyuti, Hoerudin. (2018). Revolusi Mekanisasi Pertanian Indonesia. Diakses dari <https://ppid.pertanian.go.id/> [30 Mei 2025].
- Sunkar, A., M. M. Putri, dan L. H. Bagus. (2024). Transparansi Kebijakan & Janji Kesejahteraan Petani Sawit (Studi Kasus Konawe Utara, Sulawesi Tenggara). Diakses dari <https://ti.or.id/wp-content/uploads/2024/05/TII-Laporan-Sawit-Konawe-Utara-small.pdf> [02 Juni 2025].
- Tarigan, E. E. (2020). Analisis Finansial Bibit Kelapa Sawit pada Beberapa Produsen Benih di Provinsi Sumatera Utara. Diakses dari <https://repositori.uma.ac.id/> [29 Mei 2025].
- Wahyudi, S. (2024). Peran Penyuluh Pertanian dalam Meningkatkan Produktivitas Kelapa Sawit Rakyat. Diakses dari <https://bbppbinuang.id/> [30 Mei 2025].

Wibowo, G. P. S. (2023). Usaha Kelapa Sawit di Kuala Buayan, Kalimantan Barat. Jurnal Lembaran Antropologi. Vol 2 (1). Pp: 19-32.

